

# Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Penanggulangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

Ade Putri Utami <sup>a\*</sup>, Azharyah Ibrahim <sup>b</sup>, Muhammad Adnan <sup>c</sup>

<sup>a\*,b,c</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

## ABSTRACT

Good governance plays a crucial role in influencing economic growth in a region, which subsequently contributes to poverty reduction. However, high poverty levels and uneven economic growth can negatively impact local communities. This study examines the effects of transparency, accountability, participation, and equity on poverty alleviation in West Aceh Regency. A mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative techniques with a triangulation design, was employed. The study involved 379 respondents who were major recipients of social assistance from three sub-districts: Kaway XVI, Samatiga, and Woyla. Data were collected through questionnaires, and additional insights were obtained from three government officials involved in poverty alleviation efforts at BAPEDDA West Aceh Regency. Data analysis utilized multiple linear regression with SPSS 22. The findings indicate that transparency significantly and positively influences poverty alleviation by ensuring that aid distribution is targeted and effectively managed. Accountability also has a significant positive effect, as it integrates community involvement from planning to program evaluation. Participation contributes positively by aligning programs with local needs and enhancing implementation success. Lastly, equity positively impacts poverty alleviation by promoting fair resource distribution, enabling programs to effectively reach all societal levels, including vulnerable groups.

## ABSTRAK

Good governance berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Namun, tingkat kemiskinan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dengan desain triangulasi. Sampel penelitian terdiri dari 379 penerima bantuan tertinggi di tiga kecamatan, yaitu Kaway XVI, Samatiga, dan Woyla, yang dikumpulkan melalui kuesioner. Selain itu, wawancara dilakukan dengan tiga pejabat pemerintah di BAPEDDA Kabupaten Aceh Barat yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan dengan memastikan bantuan tersalurkan secara tepat dan efektif. Akuntabilitas juga berpengaruh signifikan karena melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program. Partisipasi masyarakat memberikan dampak positif dengan menyesuaikan program pada kebutuhan lokal. Keadilan berkontribusi signifikan karena memastikan distribusi sumber daya yang adil, sehingga program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

## ARTICLE HISTORY

Received 10 November 2024

Accepted 25 November 2024

Published 30 November 2024

## KEYWORDS

Good Governance; Poverty Alleviation.

## KATA KUNCI

Good Governance; Pengentasan Kemiskinan.

## 1. Pendahuluan

Sistem pengelolaan pemerintahan di Indonesia mencerminkan keragaman yang kompleks, mencakup berbagai pendekatan dalam tata kelola di tingkat nasional maupun daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu penentu kemajuan suatu negara, karena berperan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kegiatan ekonomi serta perumusan kebijakan publik. Menurut Rizqi et al. (2022), tata kelola mencakup pengelolaan ekonomi dan politik yang terintegrasi untuk menciptakan keputusan strategis yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Implementasi tata kelola yang efektif dapat memberikan arah perkembangan daerah yang sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik menjelaskan tujuh asas penting yang harus diterapkan, yakni kepastian hukum, ketertiban penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini merupakan landasan utama yang harus diintegrasikan dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola yang efektif juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, sekaligus menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan sering kali menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang diiringi tingkat kemiskinan tinggi dapat mencerminkan lemahnya pengelolaan anggaran daerah sejak otonomi diberlakukan. Ambya dan Ciptawaty (2022) mengidentifikasi bahwa rendahnya tingkat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi penyebab utama hambatan tersebut. Tata kelola pemerintahan yang kuat dapat memberikan solusi melalui pengelolaan sumber daya yang tepat guna dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Aceh Barat, faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, rendahnya pendidikan, bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata menjadi pemicu utama kemiskinan. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Barat, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 85 Tahun 2022 menjadi salah satu kebijakan strategis yang diarahkan untuk memanfaatkan Dana Desa dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan penyediaan akses pekerjaan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan pengaruh yang lebih luas dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menerapkan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan, yang terlihat dari keterbukaan informasi terkait program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini didukung oleh pengawasan akuntabel yang memastikan bahwa alokasi dana untuk masyarakat miskin berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta menciptakan stabilitas sosial.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam menjalankan negara. UNDP (1997) mendefinisikan tata kelola sebagai mekanisme dan institusi yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka, memenuhi hak hukum, dan menjalankan kewajiban secara kolektif. Konsep ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menciptakan hasil yang menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Bank Dunia, tata kelola yang baik mencakup pengelolaan manajemen pembangunan secara bertanggung jawab dengan menghindari salah alokasi dana,

memerangi korupsi, dan memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran (Widjanarko, 2021). Rose-Ackerman (2017) menambahkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya mendorong legitimasi publik, tetapi juga memberikan dampak nyata pada pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator utama tata kelola yang baik meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Penerapan indikator-indikator ini menjadi penting dalam menciptakan tata kelola yang efektif, yang dapat mendukung program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik secara materi maupun non-materi. Rini dan Sugiharti (2017) mendefinisikan kemiskinan sebagai kesenjangan daya beli yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan mendasar. Selain itu, Chambers (2006) menyebutkan bahwa kemiskinan adalah jebakan yang melibatkan kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan, yang saling berkaitan dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat miskin.

Kemiskinan juga dianggap sebagai persoalan multidimensi yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan terpadu yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang adaptif menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Syofyan dan Putra (2020) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan melalui pengelolaan dana yang lebih efektif.

Di Indonesia, kemiskinan sering kali menjadi tantangan utama dalam pembangunan, terutama di daerah-daerah terpencil. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses pekerjaan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata sering kali menjadi pemicu utama. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal menjadi langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode mixed methods dengan desain sequential explanatory. Desain ini mengintegrasikan dua pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif yang dilakukan pada tahap awal, diikuti dengan analisis kualitatif untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari fase kuantitatif. Pada tahap kuantitatif, metode survei digunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan tahap kualitatif dilakukan melalui penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggali informasi tentang situasi dan fenomena yang ada saat penelitian berlangsung tanpa berupaya untuk menarik kesimpulan kausalitas.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh penduduk dari tiga kecamatan penerima bantuan modal usaha tertinggi di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Kecamatan Kaway XVI, Woyla, dan Samatiga, yang terdiri dari 7.109 orang. Sampel kuantitatif ditentukan menggunakan rumus Taro Yamane, menghasilkan 379 responden yang mewakili ketiga kecamatan tersebut. Sementara itu, sampel untuk analisis kualitatif terdiri dari sejumlah informan, termasuk pihak pemerintah yang berperan dalam merumuskan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 85 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat penerima bantuan modal usaha di Kabupaten Aceh Barat. Data tersebut memberikan informasi yang relevan tentang efektivitas tata kelola pemerintahan dalam program pengentasan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui beberapa metode untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian. Teknik utama yang digunakan adalah penyebaran kuesioner kepada

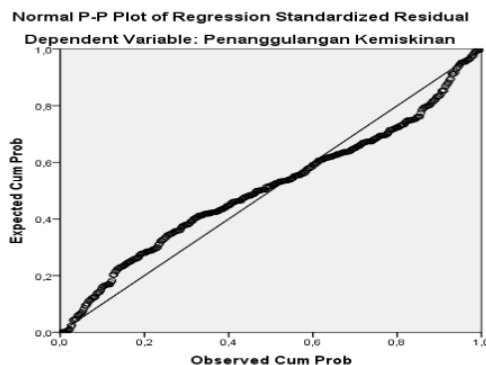
masyarakat penerima bantuan sosial untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pihak pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Perbup Nomor 85 Tahun 2022 untuk memperoleh perspektif dan informasi tambahan yang bersifat kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap kuantitatif, data dianalisis melalui uji asumsi klasik, analisis regresi, dan pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Tahap kualitatif dilakukan dengan mereduksi data wawancara, menyajikannya secara sistematis, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan tata kelola pemerintahan dalam program penanggulangan kemiskinan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Adapun hasil analisisnya dapat dinyatakan sebagai Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak atau variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas atas variabel penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas P-Plot  
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 22)

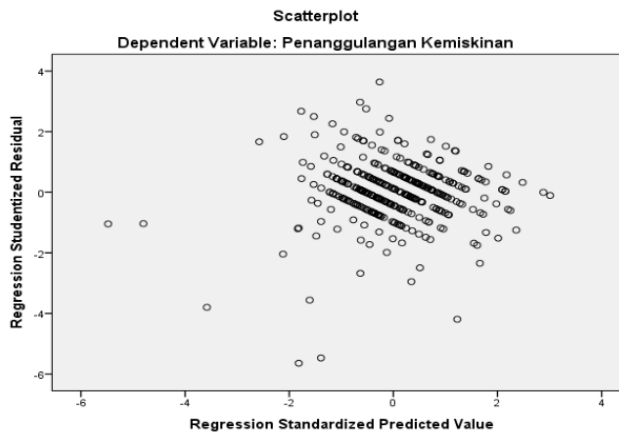
Berdasarkan Gambar 4 pada Normal P-Plot, dapat diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, data terdistribusi secara normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas adalah uji untuk variabel bebas, di mana korelasi antar variabel bebas dianalisis. Jika terdapat dua variabel bebas yang berkorelasi sangat kuat, maka secara logis persamaan regresi cukup diwakili oleh salah satu variabel tersebut. Multikolinearitas dapat diketahui jika nilai VIF  $\leq 10$  dan nilai tolerance  $> 0,1$ , maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas untuk model regresi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel                 | Tolerance | VIF   | Keterangan                      |
|--------------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| Transparency ( $X_1$ )   | 0,962     | 1,039 | Tidak terjadi multikolinieritas |
| Accountability ( $X_2$ ) | 0,982     | 1,019 | Tidak terjadi multikolinieritas |
| Participation ( $X_3$ )  | 0,971     | 1,030 | Tidak terjadi multikolinieritas |
| Equity ( $X_3$ )         | 0,964     | 1,037 | Tidak terjadi multikolinieritas |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 22)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel transparency adalah 0,962 ( $> 0,1$ ), accountability adalah 0,982 ( $> 0,1$ ), participation adalah 0,971 ( $> 0,1$ ), dan equity adalah 0,964 ( $> 0,1$ ). Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel transparency adalah 1,039 ( $< 10$ ), accountability adalah 1,019 ( $< 10$ ), participation adalah 1,030 ( $< 10$ ), dan equity adalah 1,037 ( $< 10$ ). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas di antara variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, seluruh variabel independen tidak memiliki korelasi yang kuat satu sama lain, sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan tanpa adanya potensi distorsi akibat multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan varian residual pada model regresi. Deteksi heteroskedastisitas dilakukan melalui analisis scatterplot, di mana nilai residual diplot terhadap nilai prediksi (fitted values). Jika pola yang muncul pada scatterplot menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model. Sebaliknya, jika pola yang terbentuk mengikuti bentuk tertentu seperti kipas atau kerucut, hal tersebut menunjukkan indikasi adanya heteroskedastisitas. Hasil analisis scatterplot dalam penelitian ini menunjukkan pola sebaran yang acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 22)

Hasil analisis scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Pola sebaran acak ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model regresi dianggap memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korelasi antara residual pada periode tertentu ( $t$ ) dengan residual pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Model regresi yang baik harus bebas dari masalah autokorelasi. Salah satu metode untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai Durbin-Watson (D-W). Interpretasi nilai D-W adalah sebagai

berikut: jika nilai D-W berada di bawah -2, maka terdapat autokorelasi positif; jika nilai D-W berada di antara -2 hingga +2, maka tidak ada autokorelasi; dan jika nilai D-W berada di atas +2, maka terdapat autokorelasi negatif. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berada dalam rentang yang tidak mengindikasikan adanya autokorelasi, sehingga model regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                 |                              |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted Square | R Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | ,629 <sup>a</sup> | ,396     | ,389            | 1,820                        | 1,865         |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 22)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,433. Nilai ini berada dalam rentang -2 hingga +2, yang mengindikasikan tidak adanya autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, asumsi klasik untuk penelitian ini telah terpenuhi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, hasil analisis regresi berganda menunjukkan pengaruh variabel transparency, accountability, participation, dan equity terhadap penanggulangan kemiskinan. Hasil ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam konteks penelitian yang dilakukan.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Model          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|                | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1 (Constant)   | 1,575                       | 2,258      |                           | 0,697  | 0,486 |
| Transparency   | 0,365                       | 0,033      | 0,459                     | 11,205 | 0,000 |
| Accountability | 0,094                       | 0,026      | 0,145                     | 3,570  | 0,000 |
| Participation  | 0,194                       | 0,043      | 0,185                     | 4,531  | 0,000 |
| Equity         | 0,309                       | 0,045      | 0,280                     | 6,841  | 0,000 |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 22)

Berdasarkan pada Tabel 3. maka persamaan regresi linier berganda yang menjelaskan hubungan fungsional antara penanggulangan kemiskinan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dapat diformulasikan sebagai berikut. Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Kriteria pengujianya apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  dan atau jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka model regresi signifikan secara statistik dan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji t (Uji Parsial)

| Model          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|                | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1 (Constant)   | 1,575                       | 2,258      |                           | 0,697  | 0,486 |
| Transparency   | 0,365                       | 0,033      | 0,459                     | 11,205 | 0,000 |
| Accountability | 0,094                       | 0,026      | 0,145                     | 3,570  | 0,000 |

|               |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Participation | 0,194 | 0,043 | 0,185 | 4,531 | 0,000 |
| Equity        | 0,309 | 0,045 | 0,280 | 6,841 | 0,000 |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 22)

- 1)  $H_1$ : *Transparency* berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai variable  $t_{hitung}$  sebesar  $11,205 > 1,649$ , dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$ . Artinya *transparency* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan, dengan demikian hipotesis diterima.
- 2)  $H_2$ : *Accountability* berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai variabel *Accountability*  $t_{hitung}$  sebesar  $3,570 > 1,649$ , dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 > \alpha 0,05$ . Artinya *accountability* berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, dengan demikian hipotesis diterima.
- 3)  $H_3$ : *Participation* berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai variabel *participation*  $t_{hitung}$  sebesar  $4,531 > 1,649$ , dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < \alpha 0,05$ . Artinya *participation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan, dengan demikian hipotesis diterima.
- 4)  $H_4$ : *Equity* berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai variabel *equity*  $t_{hitung}$  sebesar  $6,841 > 1,649$ , dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < \alpha 0,05$ . Artinya *equity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan, dengan demikian hipotesis diterima.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (*transparency*, *accountability*, *participation*, dan *equity*) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat). Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini.

Tabel 5. Hasil Analisis Uji F

| Model        | Sum of Squares | df  | Mean Square | F      | Sig.              |
|--------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 811,868        | 4   | 202,967     | 61,269 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual     | 1238,955       | 374 | 3,313       |        |                   |
| Total        | 2050,823       | 378 |             |        |                   |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 22)

Berdasarkan Tabel 5. pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan (keseluruhan) *transparency*, *accountability*, *participation*, dan *equity* terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat dari hasil uji F pada tabel. Nilai  $F_{hitung} = 61,269 > F_{tabel} = 2,63$  dengan nilai signifikan =  $0,000$ . Dengan demikian nilai signifikan ( $0,000 < 0,05$ ), maka terdapat pengaruh yang signifikan antara *transparency*, *accountability*, *participation*, dan *equity* terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah nilai yang menggambarkan sejauh mana perubahan atau variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi, kita dapat menilai kebaikan model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Terdapat dua jenis koefisien determinasi, yaitu koefisien determinasi biasa (R Square) dan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square). Dalam regresi linear berganda, penggunaan koefisien determinasi yang disesuaikan lebih baik dalam menilai seberapa baik model dibandingkan dengan koefisien determinasi biasa. Berikut adalah hasil pengujian koefisien determinasi, yaitu:

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,629 <sup>a</sup> | ,396     | ,389              | 1,820                      |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 (SPSS Versi 22)

Tabel 6. menunjukkan nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,396 yang berarti bahwa 39,6% variasi nilai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat ditentukan oleh keempat variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini yaitu *transparency*, *accountability*, *participation*, dan *equity*. Sedangkan sisanya (100% - 39,6% = 60,4%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan tersebut di atas.

### 3.1.1 Pengaruh Good Governance aspek *transparency* terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transparency* berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Artinya transparansi dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan memiliki dampak positif terhadap efektivitas dan keberhasilan program tersebut. Dengan transparansi, informasi mengenai alokasi dana, pelaksanaan program, dan hasil-hasil yang dicapai tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai ( $X_1$ )  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $11,205 > 1,649$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai sig < 0,05 (0,000 < 0,05) maka terdapat kontribusi yang signifikan *transparency* terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Hasil penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber bahwa di Kabupaten Aceh Barat, transparansi dalam penanggulangan kemiskinan dicapai melalui keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Ini mencakup akses publik terhadap data, partisipasi melalui pertemuan desa, forum, survei, dan sosialisasi media, serta proses seleksi penerima bantuan yang transparan melalui pendataan, verifikasi, dan pengumuman hasil. Mekanisme pengaduan tersedia untuk menangani ketidakadilan, sementara kerja sama dengan lembaga anti-korupsi dan pelaporan terbuka menangani kasus korupsi. Evaluasi berkala dan audit reguler memastikan bahwa anggaran kemiskinan digunakan secara efektif dan sesuai sasaran.

Dengan demikian di Kabupaten Aceh Barat, aspek transparansi dari *good governance* berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dengan memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan. Transparansi memperkuat kepercayaan publik melalui aksesibilitas informasi, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang jelas dalam seleksi penerima bantuan. Dengan mekanisme pengaduan dan penanganan korupsi yang efektif, serta evaluasi dan audit reguler, transparansi memastikan bahwa bantuan kemiskinan tepat sasaran dan dikelola secara efektif, sehingga meningkatkan dampak program terhadap pengentasan kemiskinan.

Aspek transparansi dalam *good governance* berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dengan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan dalam program bantuan. Transparansi memastikan bahwa informasi tentang program bantuan, termasuk kriteria seleksi dan penggunaan anggaran, tersedia secara terbuka bagi publik. Ini melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum diskusi dan survei, sehingga kebutuhan mereka dapat diakomodasi dengan lebih baik. Proses seleksi yang transparan mengurangi risiko favoritisme dan korupsi, sementara mekanisme pengaduan dan audit berkala membantu mengatasi ketidakadilan dan memastikan efektivitas penggunaan dana. Dengan demikian, transparansi mendukung pengelolaan yang lebih baik dan dampak yang lebih positif dari program-program pengentasan kemiskinan (UNDP, 2002).

Transparansi dalam *good governance* berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan karena meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan teori, transparansi mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dengan memungkinkan masyarakat mengawasi proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya (World Bank, 2004). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh S. Hossain menemukan bahwa transparansi dalam *good governance* secara signifikan mempengaruhi pengurangan kemiskinan. Aspek transparansi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi, yang pada gilirannya memperbaiki efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Transparansi memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan benar dan program bantuan mencapai target yang tepat, membantu mengatasi ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam distribusi bantuan. Dengan menerapkan kebijakan transparansi, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memperbaiki hasil pembangunan secara keseluruhan (Hossain, 2019). Hasil penelitian lainnya yang dikemukakan oleh Moirad dan Dubois juga mengatakan bahwa penerapan transparansi yang kuat dalam tata kelola dapat memainkan peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan memastikan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat miskin (Mourad & Dubois, 2020). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan menerapkan sikap transparansi maka dapat memberikan suatu kontribusi penting dalam menaggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Pihak pemerintah harus menanamkan sikap saling terbuka, sehingga pihak masyarakat miskin dapat teratasi sesuai dengan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

### 3.1.2 Pengaruh Good Governance aspek Accountability terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *accountability* berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Artinya akuntabilitas mempengaruhi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, yang berarti bahwa peningkatan tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan dana dan program pemerintah berkontribusi pada efektivitas upaya pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai  $(X_2) t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,570 > 1,649$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai  $sig < 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) maka terdapat kontribusi yang signifikan *accountability* terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Hasil penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan pendekatan akuntabilitas komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat dari perencanaan hingga evaluasi program. Proses ini meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan berbasis data, pelaksanaan transparan, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Program didasarkan pada data akurat dari survei dan verifikasi, dengan pelaksanaan dipantau ketat melalui audit dan laporan berkala. Kebijakan dikomunikasikan jelas, dan keberhasilan diukur dengan indikator kinerja terintegrasi untuk memastikan efektivitas dan transparansi.

Pengaruh aspek akuntabilitas dalam *good governance* terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat sangat signifikan. Akuntabilitas, yang mencakup transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana dan program, berperan penting dalam memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dan digunakan secara efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan dari perencanaan hingga evaluasi serta menerapkan mekanisme pemantauan ketat, audit, dan laporan berkala, pemerintah dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Data

akurat dari survei dan verifikasi mendasari keputusan program, sementara komunikasi yang jelas tentang kebijakan dan hasil program membantu membangun kepercayaan masyarakat. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efisien dan berdampak, sehingga membantu mengurangi kemiskinan secara lebih efektif di Kabupaten Aceh Barat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh J. Smith & R. Johnson menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana dan program pemerintah berkontribusi pada peningkatan hasil pengentasan kemiskinan. Akuntabilitas membantu memastikan bahwa dana digunakan dengan benar, mengurangi korupsi, dan meningkatkan transparansi, yang pada gilirannya memperbaiki implementasi program dan hasil yang dicapai. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mekanisme akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan efektivitas intervensi pengurangan kemiskinan (Smith & Johnson, 2017).

### 3.1.3 Pengaruh Good Governance aspek participation terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *participation* berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Artinya keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan dapat meningkatkan efektivitas dan hasil dari upaya pengurangan kemiskinan. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa program lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan memperkuat dukungan serta keberhasilan implementasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai  $(X_2) t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $4,531 > 1,649$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai sig < 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka terdapat kontribusi yang signifikan *participation* terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Hasil penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil mengintegrasikan partisipasi aktif warga miskin dalam semua tahapan program bantuan modal usaha, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan warga dilakukan melalui pertemuan desa, forum diskusi, dan kelompok pemantau. Selain itu, pemerintah menyediakan pelatihan dan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan kewirausahaan warga miskin. Pemantauan dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan bantuan dan melakukan perbaikan program berdasarkan umpan balik warga. Upaya ini meningkatkan keberhasilan dan dampak program dalam pengentasan kemiskinan.

Teori mengenai pengaruh aspek partisipasi dalam good governance terhadap penanggulangan kemiskinan menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi program memiliki dampak positif pada efektivitas upaya pengurangan kemiskinan. Partisipasi aktif memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin diakomodasi dengan lebih baik, meningkatkan relevansi dan keberhasilan program. Dengan melibatkan warga dalam berbagai tahapan, dari perencanaan hingga pelaksanaan, program dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan memperoleh dukungan serta komitmen yang lebih besar dari masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang membantu meminimalkan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya, serta memperbaiki hasil akhir dari program pengentasan kemiskinan (Cornwall & Coelho, 2007).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh K. Edwards dan R. Hulme mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan. Partisipasi aktif memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin diakomodasi

dengan lebih baik, yang meningkatkan relevansi dan keberhasilan program-program pengurangan kemiskinan. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tetapi juga memperkuat dukungan dan komitmen terhadap program, sehingga menghasilkan dampak yang lebih positif dalam pengentasan kemiskinan (Edwards & Hulme, 2011).

### 3.1.4 Pengaruh Good Governance aspek Equity terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *equity* berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Artinya, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan (*equity*) memiliki pengaruh penting terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Dengan memastikan bahwa sumber daya dan kesempatan didistribusikan secara adil dan merata, program pengentasan kemiskinan dapat lebih efektif dalam menjangkau dan membantu semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan. Kesetaraan dalam distribusi bantuan dan peluang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan dampak program, dan mempercepat kemajuan dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai  $(X_2) t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $6,841 > 1,649$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuannya jika nilai  $sig < 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) maka terdapat kontribusi yang signifikan *equity* terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Hasil penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber bahwa kesetaraan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat menekankan pada distribusi adil kesempatan dan sumber daya, khususnya untuk kelompok rentan seperti wanita, penyandang disabilitas, dan minoritas. Pemerintah memastikan akses setara terhadap hak dasar dengan memetakan kebutuhan, menerapkan kebijakan inklusif, dan menyediakan fasilitas tambahan untuk kelompok rentan. Kebijakan ini mencakup analisis gender untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik. Langkah strategis pemerintah mencakup perencanaan terpadu, pendanaan khusus, pelibatan stakeholder, pelaksanaan program dengan prinsip kesetaraan, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan kesetaraan gender dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Berikut adalah beberapa teori terkait pengaruh aspek *equity* (kesetaraan) dalam *good governance* terhadap penanggulangan kemiskinan:

- 1) Teori Keadilan Sosial (*Social Justice Theory*): Teori ini, yang dikembangkan oleh John Rawls, menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil dalam masyarakat. Rawls berargumen bahwa prinsip keadilan sosial harus memastikan bahwa kekayaan dan kesempatan didistribusikan secara merata, terutama untuk mendukung kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks *good governance* dan penanggulangan kemiskinan, teori ini mendukung pendekatan yang memastikan kesetaraan akses dan peluang bagi semua lapisan masyarakat, sehingga mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan (Rawls, 1971).
- 2) Teori Kapabilitas (*Capability Approach*): Dikembangkan oleh Amartya Sen, teori ini fokus pada kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang diinginkan. Sen berargumen bahwa kesetaraan bukan hanya tentang distribusi sumber daya tetapi juga tentang memastikan bahwa semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mencapai hasil yang baik. Dalam *good governance*, pendekatan ini mendukung upaya yang berfokus pada meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin melalui distribusi yang adil dan kebijakan inklusif yang memperhitungkan kebutuhan khusus (Sen, 1999).
- 3) Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*): Teori ini menganggap hak atas kesetaraan dan perlakuan adil sebagai hak dasar manusia. Dalam konteks *good*

governance, teori ini menekankan bahwa pemerintah harus memastikan hak-hak ini diakui dan dipenuhi, termasuk dalam konteks distribusi sumber daya dan peluang. Ini mendukung prinsip bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan harus memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan, memiliki hak yang sama untuk akses dan manfaat dari program-program tersebut (Donnelly, 2003).

- 4) Teori Tata Kelola Inklusif (*Inclusive Governance Theory*): Teori ini berfokus pada pentingnya partisipasi dan keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Aspek equity dalam tata kelola inklusif menekankan perlunya melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan memastikan bahwa kebijakan dan program mencerminkan kebutuhan mereka. Dengan menciptakan ruang bagi semua suara, terutama dari kelompok yang kurang beruntung, pemerintah dapat merancang dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan adil.
- 5) Teori Keadilan Distribusi (*Distributional Justice Theory*): Teori ini membahas bagaimana sumber daya dan keuntungan dalam masyarakat harus didistribusikan secara adil. Dalam good governance, teori ini mendukung pembuatan kebijakan yang memprioritaskan distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang memperhatikan aspek equity berupaya untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada dan memastikan bahwa semua kelompok mendapatkan manfaat yang adil dari program pengentasan kemiskinan.

Dari hasil temuan di atas, maka sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frances Stewart bahwa kesetaraan sosial dan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Artikel ini menunjukkan bahwa distribusi yang adil dari kesempatan dan sumber daya sangat penting dalam mencapai hasil pembangunan yang efektif. Ketika sumber daya dan peluang didistribusikan secara merata, terutama kepada kelompok yang rentan, hal ini dapat mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan hasil pembangunan, dan mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Kesetaraan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap manfaat pembangunan, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3.2 Pembahasan

Uji asumsi klasik menjadi tahap awal untuk memastikan model regresi memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Hasil uji normalitas menunjukkan data residual tersebar di sekitar garis diagonal pada *Normal P-Plot*, yang mengindikasikan data terdistribusi normal. Temuan ini sejalan dengan prinsip regresi linier klasik, yang mensyaratkan distribusi residual normal untuk menghasilkan estimasi yang tidak bias dan efisien (Gujarati & Porter, 2009). Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, yang berarti tidak ada hubungan multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini relevan dengan panduan regresi linier yang menyatakan bahwa multikolinearitas dapat merusak interpretasi koefisien regresi (Hair et al., 2010). Selain itu, uji heteroskedastisitas menunjukkan pola sebaran residual yang acak pada *scatterplot*, menandakan homoskedastisitas terpenuhi. Uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,433, yang berada dalam rentang -2 hingga +2, sehingga menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Dengan terpenuhinya semua asumsi klasik, model regresi dianggap layak untuk digunakan (Wooldridge, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Transparansi memainkan peran kunci dalam memastikan keterbukaan informasi mengenai alokasi sumber daya,

pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan. Menurut UNDP (2002), transparansi meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah penyalahgunaan dana, yang berdampak positif pada pengurangan kemiskinan. Mourad & Dubois (2020) juga menunjukkan bahwa transparansi yang tinggi dalam tata kelola berkontribusi pada efektivitas program pengentasan kemiskinan dengan memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efisien. Di Kabupaten Aceh Barat, mekanisme pengaduan, audit reguler, dan akses informasi publik menjadi komponen utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntabilitas juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Dengan meningkatkan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program, akuntabilitas memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara tepat. Temuan ini didukung oleh penelitian Smith & Johnson (2017), yang menemukan bahwa akuntabilitas meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap program pengurangan kemiskinan. Di Kabupaten Aceh Barat, pemerintah menggunakan indikator kinerja terintegrasi, audit berkala, dan pelaporan transparan untuk memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan mencapai kelompok sasaran secara efektif.

Partisipasi masyarakat menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan keberhasilan implementasi. Cornwall & Coelho (2007) menekankan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat keberhasilan program dengan meningkatkan relevansi, keberlanjutan, dan transparansi. Di Kabupaten Aceh Barat, partisipasi diwujudkan melalui pertemuan desa, kelompok pemantau, dan pelatihan kewirausahaan, yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan program bantuan.

Kesetaraan memiliki pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa bantuan dan peluang didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Teori keadilan sosial oleh Rawls (1971) menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini relevan dengan kebijakan di Kabupaten Aceh Barat yang memprioritaskan distribusi bantuan yang adil melalui pendekatan inklusif, analisis gender, dan fasilitas tambahan untuk kelompok rentan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kesenjangan sosial tetapi juga mempercepat keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

Uji F menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 39,6% variasi dalam penanggulangan kemiskinan dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil ini mendukung pandangan UNDP (1997) bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara terpadu meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pembangunan. Absadykov (2020) juga menyoroti bahwa tata kelola yang baik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang.

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan) memiliki pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Transparansi memastikan keterbukaan informasi dan mencegah korupsi, sementara akuntabilitas meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat memungkinkan program yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sedangkan kesetaraan memastikan distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang.

Secara simultan, keempat variabel ini berkontribusi pada efektivitas program pengentasan kemiskinan dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat terus mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan, sebagaimana didukung oleh literatur seperti UNDP (2002), Mourad & Dubois (2020), dan Cornwall & Coelho (2007).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aspek Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, baik secara parsial maupun simultan. Transparansi menjamin keterbukaan informasi mengenai alokasi dana, pelaksanaan program, dan pencapaian hasil, yang meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas program pengentasan kemiskinan. Akuntabilitas memastikan masyarakat terlibat aktif dalam seluruh proses program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga sumber daya dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat memperkuat relevansi program terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan dukungan terhadap implementasi program. Kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang menjamin bahwa bantuan mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mempercepat pengurangan kemiskinan.

Sebagai rekomendasi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu memperluas akses informasi terkait program pengentasan kemiskinan melalui platform digital dan forum masyarakat untuk meningkatkan transparansi. Mekanisme audit dan pelaporan harus diperkuat untuk memastikan penggunaan dana sesuai sasaran, dan lembaga independen dapat dilibatkan dalam evaluasi program guna meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat perlu didorong melalui pelatihan kewirausahaan dan keterlibatan dalam setiap tahapan program, khususnya untuk kelompok rentan. Pemerintah juga harus menjamin kesetaraan dalam distribusi bantuan dengan menerapkan kebijakan berbasis data yang akurat serta analisis gender untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik kelompok marginal. Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan dampaknya dalam jangka panjang. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dapat lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### References

- Absadykov, A. (2020). Does good governance matter? Kazakhstan's economic growth and worldwide governance indicators. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.26618/ojip.v10i1.2776>
- Ambya, A., & Ciptawaty, U. (2022). Hubungan antara belanja pemerintah, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru di Provinsi Lampung. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 157–166. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17747>
- Cornwall, A., & Coelho, V. (2007). Participation and poverty reduction: A framework for analysis. *Development Policy Review*.

- Dari, D. W., Apriliyani, D., & Handayani, W. (2022). Implementasi pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta berbasis tata kelola kolaboratif dalam program Gandeng Gendong. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i1.6545>
- Donnelly, J. (2003). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.
- Edwards, M., & Hulme, R. (2011). The role of participation in good governance for poverty reduction. *World Development*.
- Gallego-Álvarez, I., Rodríguez-Rosa, M., & Vicente-Galindo, P. (2021). Are worldwide governance indicators stable or do they change over time? A comparative study using multivariate analysis. *Mathematics*, 9(24), 3257. <https://doi.org/10.3390/math9243257>
- Hossain, S. (2019). The impact of good governance on poverty reduction: Evidence from South Asia. *International Journal of Public Administration*, 43(5).
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2008). Governance indicators: Where are we, where should we be going? *World Bank Research Observer*, 23(1), 1–30. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkm012>
- Linawati, Y., Suzantia, H., & Wibowo, M. G. (2021). Dampak tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia: Studi kasus negara berkembang OKI. *Temail: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12547>
- Ma'ruf, M. (2022). Implementation of the poverty reduction acceleration policy in Karawang Regency, Indonesia. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(2), 77–91. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i2.2715>
- Mario, C. (2021). How a good governance of institutions can reduce poverty and inequality in society? In *Dynamics of institutional change in emerging market economies: Theory and evidence* (pp. 1–13). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-60978-8>
- Marsuni, N. S., Rasulong, I., Kusumawati, A., & Nirwana, N. (2022). Factors affecting the implementation of good government governance (GGG) and its implications for performance accountability. *Jurnal Ekonomi Balance*, 18(2), 29–36. <https://doi.org/10.26618/jeb.v18i2.7876>
- Mourad, S., & Dubois, A. (2020). Transparency and accountability in governance: Pathways to effective poverty alleviation. *Journal of Governance and Development*, 15(2).
- Nations, U. (2000). What is good governance? *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*, 69–70. <https://doi.org/10.18356/d4072237->

en-fr

- Rawls, J. A. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2017). Faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia: Analisis rumah tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 17–33. <https://doi.org/10.20473/jiet.v1i2.3252>
- Rizqi, I. P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Galuh Kartika, A. (2022). Analisis tata kelola pemerintah terhadap kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 263–272. <https://doi.org/10.21776/jdessa>
- Rose-Ackerman, S. (2017). What does “governance” mean? *Governance*, 30(1), 23–27. <https://doi.org/10.1111/gove.12212>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Smith, J., & Johnson, R. (2017). Governance and poverty reduction: An assessment of the role of accountability. *International Journal of Public Administration*.
- Syofyan, R., & Putra, D. G. (2020). The role of good corporate governance (GCG) implementation in Indonesian company. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 124, 819–825. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.148>
- Ulisah, S. (2016). Pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terhadap resistensi sosial perubahan pembangunan masyarakat. *Gema Keadilan*, 3(1), 78–86. <https://doi.org/10.14710/gk.2016.3645>
- Umar, D. A., Mukramin, S., Arifin, J., & Aziz, F. (2023). Kemiskinan masyarakat urban Makassar. *E-Journal Nalanda*, 1(3), 12–25. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.339>
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Weiss, T. G. (2012). Governance, good governance, and global governance: Conceptual and actual challenges. *Thinking about Global Governance: Why People and Ideas Matter*, 21(5), 168–189. <https://doi.org/10.4324/9780203807057-19>
- Widjanarko. (2021). Analisis hubungan good governance dan pertumbuhan. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 155–168. <https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.340>
- World Bank. (2004). *Making services work for poor people*. *World Development Report*.